



## Pengarusutamaan Gender Harus Digalakkan di Semua Lini

Sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang adil gender, maka pengarusutamaan gender perlu digalakkan di berbagai lini, salah satunya di tingkat kelurahan.

Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menggelar Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di sejumlah kelurahan di Kota Jogja, salah satunya Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Selasa (3/9).

Pegiat gender yang aktif di organisasi IDEA dan Komunitas AKSARA, Amin Nurohman, mengatakan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (musrenbangkel) menjadi titik strategis bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan gender di tingkat kelurahan. "Sebab dari situ kelurahan membentuk berbagai program," ujarnya.

Dalam musrenbangkel, kata dia, seharusnya mengangkat persoalan yang memang dirasakan oleh warga, bukannya persoalan yang menjadi penjenamaan kelurahan atau yang diinginkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Sehingga tercipta program yang memang dibutuhkan warga," ujar dia.

Musrenbangkel juga perlu melibatkan pihak-pihak marginal yang partisipasinya masih sangat kecil, seperti perempuan dan forum anak. Padahal sebagai warga negara, perempuan dan anak hendaknya memiliki hak dan porsi yang sama dalam pembangunan, setidaknya di wilayah mereka masing-masing.

"Partisipasi perempuan minimal 30 persen baik dalam musrenbang di tingkat RT/RW dan musrenbang kelurahan," kata dia.

Sejumlah lembaga seputar kelurahan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), PKK, Lansia, Posyandu dan PAUD perlu didorong untuk menyalurkan aspirasinya masing-masing. "Kalau tidak tersampaikan maka program pun tidak akan menjawab permasalahan," kata dia.

Dia melihat selama ini stimulan LPMK terlalu banyak di pembangunan fisik, padahal LPMK sangat potensial untuk mendorong pembangunan nonfisik.

"Contohnya, program jam belajar masyarakat, taman belajar dan lainnya," ucap Amin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMP2A) Kota Jogja, Edy Muhammad, mengatakan pengarusutamaan gender merupakan amanah dari tiga regulasi, yakni Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Permendagri No. 67/2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No.15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; serta Milenium Development Goals (MDG's).

Tujuan pengarusutamaan gender, kata dia, di antaranya adalah untuk memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan. Selain itu juga agar masyarakat bisa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

"Tak hanya itu, melalui pengarusutamaan gender, diharapkan pula adanya kontrol dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan," kata dia. (Adv)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005